

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Data dan Sampel

Dalam penelitian ini, obyek yang diteliti adalah laporan keuangan seluruh pemerintah provinsi di Indonesia selama tahun 2019 hingga tahun 2020. Laporan keuangan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar dengan pengecualian (WDP), serta memiliki data variabel yang diperlukan. Penulis mendapatkan data laporan keuangan pemerintah provinsi dari Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Tabel 4.1
Kriteria Sampel

Kriteria	Jumlah
Laporan keuangan pemerintahan daerah tingkat Provinsi di Indonesia	34
Provinsi yang tidak menerbitkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2019-2020.	(13)
Sampel penelitian	21
Jumlah Observasi (21 x 2 Tahun)	42

Sumber: data diolah sendiri, 2021.

Berdasarkan tabel diatas, jumlah Provinsi yang ada di Indonesia berjumlah 34. Provinsi yang tidak menerbitkan LKPD tahun 2019-2020 berjumlah 13. Berdasarkan kriteria, maka sampel penelitian berjumlah 21 Provinsi dengan observasi 2 tahun. Maka sampel akhir berjumlah 42 sampel.

4.1.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Penjelasan kelompok melalui modus, median, mean, dan variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku. (Ghozali; 2019).

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengungkapan LKPD	42	.6765	.9412	.822140	.0839418
Ukuran Pemerintah	42	28.4754	33.8855	30.438610	1.1508592
Tingkat Kemandirian	42	.2043	2.8932	.925393	.6415567
Ukuran OPD	42	31	63	45.52	7.578
Ukuran Legislatif	42	35	120	70.10	24.586
Temuan Audit	42	1	29	9.79	6.838
Valid N (listwise)	42				

Sumber: data diolah SPSSV26, 2021

Berdasarkan dari tabel di atas, menyajikan hasil uji statistik deskriptif untuk setiap variabel dalam penelitian dan menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan sampel (N) sebanyak 42. Variabel pengungkapan LKPD memiliki nilai minimum 0,6765 dan nilai maksimum 0,9412. Nilai rata – rata yang diperoleh pada variabel ini 0,8221 dengan standar deviasi sebesar 0,0839. Sedangkan untuk variabel ukuran pemerintahan memiliki nilai minimum 28,4754 dan nilai maksimum 33,8855. Nilai rata – rata yang diperoleh pada variabel ini 30,4386 dengan standar deviasi sebesar 1,15085.

Variabel tingkat kemandirian memiliki nilai minimum 0,2043 dan nilai maksimum 2,8932. Nilai rata – rata yang diperoleh pada variabel ini 0,9253 dengan standar deviasi sebesar 0,6415. Sedangkan untuk variabel ukuran OPD memiliki nilai minimum 31 dan nilai maksimum 63. Nilai rata – rata yang diperoleh pada variabel ini 45,52 dengan standar deviasi sebesar 7,578. Variabel ukuran legislatif memiliki nilai minimum 35 dan nilai maksimum 120. Nilai rata – rata yang diperoleh pada variabel ini 70,10 dengan standar deviasi sebesar 24,586. Sedangkan untuk variabel temuan audit memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 29. Nilai rata – rata yang diperoleh pada variabel ini 9,79 dengan standar deviasi sebesar 6,838.

Berdasarkan hasil uji deskripsi diatas, menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan LKPD yang ada pada provinsi di Indonesia cenderung menurun jika di liat dari nilai rata – rata yaitu 0,822. Sedangkan jika dilihat dari semua variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata, artinya bahwa data variabel penelitian mengindikasikan hasil yang baik

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Kolmogorov - Smirnov* (Ghozali, 2019). Kriteria pengambilan keputusannya yaitu jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $\geq 0,05$ data berdistribusi normal.

Tabel 4.3
Uji Normalitas Data

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06149801
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.096
	Negative	-.085
Test Statistic		.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: data diolah SPSSV26, 2021

Pada hasil uji statistic non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* dapat dilihat bahwa nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai signifikan dengan uji *one sampel Kolmogorov - smirnov* untuk semua variabel lebih besar dari 0,050, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut

terdistribusi secara normal. (Ghozali, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau dapat dikatakan juga bahwa model regresi memenuhi asumsi normal.

4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variable independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna diantara variable bebas (korelasi 1 atau mendekati 1) (Ghozali, 2019). Pada penelitian ini uji multikolinieritas menggunakan nilai *Tolerance* dan *Inflation Faktor* (VIF) pada model regresi. Pengambilan keputusan pada uji multikolinieritas jika nilai *Tolerance value* > 0,10 atau VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.5
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
Ukuran Pemerintah	.506	1.976
Tingkat Kemandirian	.538	1.858
Ukuran OPD	.696	1.438
Ukuran Legislatif	.771	1.297
Temuan Audit	.673	1.487

a. Dependent Variable: Pengungkapan LKPD

Sumber: data diolah SPSSV26, 2021

Berdasarkan uji multikolinieritas diatas, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan nilai *tolerance*, menunjukkan bahwa variabel – variabel memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1. Sedangkan hasil dari perhitungan *varian inflation factor* (VIF), menunjukkan bahwa variabel – variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10. Dimana jika nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat korelasi antara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2019).

4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya dalam analisis regresi (Ghozali, 2019). Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (DW-test). Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan $(4-du)$ maka koefisien autokorelasi sama dengan nol berarti tidak ada autokorelasi.

Tabel 4.
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.681 ^a	.463	.389	.0656299	2.690

a. Predictors: (Constant), Temuan Audit, Ukuran Legislatif, Tingkat Kemandirian, Ukuran OPD, Ukuran Pemerintah

b. Dependent Variable: Pengungkapan LKPD

Sumber: data diolah SPSSV26, 2021

Nilai Durbin-Watson sebesar 2,690 nilai ini jika dibandingkan dengan nilai Tabel Durbin-Watson dengan menggunakan derajat kepercayaan 5% dengan jumlah sampel sebanyak 42 serta jumlah variabel independent (K) sebanyak 5, maka ditabel durbin Watson akan didapat nilai dl sebesar 1,254 dan du sebesar 1,781. Dapat diambil kesimpulan bahwa: $dw > du$, yang artinya nilai dw (2,690) lebih besar dari nilai du (1,781). Maka dapat di ambil keputusan tidak ada autokorelasi positif pada model regresi tersebut.

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah nilai dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser (Ghozali, 2019). Uji *Glejser* dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika

nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4.6
Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.094	.179		.525	.603
Ukuran Pemerintah	-.001	.006	-.042	-.182	.857
Tingkat Kemandirian	.004	.011	.087	.383	.704
Ukuran OPD	.000	.001	-.059	-.297	.768
Ukuran Legislatif	1.924E-5	.000	.015	.082	.935
Temuan Audit	.000	.001	-.025	-.123	.903

a. Dependent Variable: RES_2

Sumber: data diolah SPSSV26, 2021

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser pada tabel 4.6, dapat dilihat bahwa sig. pada semua variabel penelitian bernilai lebih besar dari 0,05 dan nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.3 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda adalah analisis untuk mengetahui besarnya pengaruh antara dua atau lebih variable independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variable dependen dengan menggunakan variable independen. Dalam regresi linier berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi, yaitu residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya heteroskedastisitas dan tidak adanya autokorelasi pada model regresi. (Ghozali, 2019).

Tabel 4.7
Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.737	.361		2.042	.049
Ukuran Pemerintahan	.000	.013	-.006	-.034	.973
Tingkat Kemandirian	-.037	.022	-.281	-1.689	.100
Ukuran OPD	.006	.002	.535	3.657	.001
Ukuran Legislatif	-.002	.000	-.468	-3.363	.002
Temuan Audit	-.003	.002	-.216	-1.451	.155

a. Dependent Variable: Pengungkapan LKPD
Sumber: data diolah SPSSV26, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dirumuskan bahwa model persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{LKPD} = 0,737 + 0,000\text{UP} - 0,037\text{TM} + 0,006\text{UO} - 0,002\text{UL} - 0,003\text{TA} + \text{E}$$

Berdasarkan hasil persamaan diatas terlihat bahwa:

1. Apabila nilai ukuran pemerintahan, tingkat kemandirian, ukuran OPD, ukuran legislatif dan temuan audit bersifat konstan ($X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 = 0$), maka tingkat pengungkapan LKPD (Y) akan bertambah sebesar 0,737.
2. Apabila nilai ukuran pemerintahan (X_1) dinaikan sebanyak 1x dengan tingkat kemandirian, ukuran OPD, ukuran legislatif dan temuan audit bersifat konstan ($X_2, X_3, X_4, X_5 = 0$), maka tingkat pengungkapan (Y) akan bertambah sebesar 0,000.
3. Apabila nilai tingkat kemandirian (X_2) dinaikan sebanyak 1x dengan ukuran pemerintahan, ukuran OPD, ukuran legislatif dan temuan audit bersifat konstan ($X_1, X_3, X_4, X_5 = 0$), maka tingkat pengungkapan (Y) akan berkurang sebesar -0,037
4. Apabila nilai ukuran OPD (X_3) dinaikan sebanyak 1x dengan ukuran pemerintahan, tingkat kemandirian, ukuran legislatif dan temuan audit

bersifat konstan ($X_1, X_2, X_4, X_5 = 0$), maka tingkat pengungkapan (Y) akan bertambah sebesar 0,06

5. Apabila nilai ukuran legislatif (X_4) dinaikan sebanyak 1x dengan ukuran pemerintahan, tingkat kemandirian, ukuran OPD dan temuan audit bersifat konstan ($X_1, X_2, X_3, X_5 = 0$), maka tingkat pengungkapan (Y) akan berkurang sebesar -0,002
6. Apabila nilai temuan audit (X_5) dinaikan sebanyak 1x dengan ukuran pemerintahan, tingkat kemandirian, ukuran OPD, dan ukuran legislatif bersifat konstan ($X_1, X_2, X_3, X_4 = 0$), maka tingkat pengungkapan (Y) akan berkurang sebesar -0,003

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ($\text{Adjusted } R^2$) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi pada model regresi dengan dua atau lebih variabel independen ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square ($\text{Adj. } R^2$). (Ghozali, 2019).

Tabel 4.8
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.681 ^a	.463	.389	.0656299	2.690

a. Predictors: (Constant), Temuan Audit, Ukuran Legislatif, Tingkat Kemandirian, Ukuran OPD, Ukuran Pemerintah

b. Dependent Variable: Pengungkapan LKPD

Sumber: data diolah SPSSV26, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui besarnya koefisien korelasi ganda pada kolom R sebesar 0,681. Koefisien determinasinya pada kolom *R Square* menunjukkan angka 0,463. Kolom *Adjusted R Square* merupakan koefisien determinasi yang telah dikoreksi yaitu sebesar 0,389 atau sebesar 38,9%, yang menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintahan, tingkat kemandirian, ukuran

OPD, ukuran legislatif, dan temuan audit memberikan kontribusi terhadap tingkat pengungkapan LKPD sebesar 38,9%, sedangkan sisanya 61,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

4.4.2 Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model (Uji F-test) digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sudah layak yang menyatakan bahwa variable independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variable dependen (Ghozali, 2019). Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji F pada tingkat kepercayaan 95% atau α sebesar 0,05, apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka model dinyatakan layak digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.9
Uji Kelayakan Model

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.134	5	.027	6.214	.000 ^b
	Residual	.155	36	.004		
	Total	.289	41			

a. Dependent Variable: Pengungkapan LKPD

b. Predictors: (Constant), Temuan Audit, Ukuran Legislatif, Tingkat Kemandirian, Ukuran OPD, Ukuran Pemerintah

Sumber: data diolah SPSSV26, 2021

Dari tabel tersebut terlihat bahwa F_{hitung} sebesar 6,214 sedangkan F_{tabel} diperoleh melalui tabel F sehingga $Dk: 5-1 = 4$ $Df: 42-5-1 = 36$, maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 2,630 artinya $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($6,214 > 2,630$) dan tingkat signifikan $p\text{-value} < 0,05$ ($0,000 < 0,05$), dengan demikian H_a diterima, maka model diterima dan penelitian dapat diteruskan ke penelitian selanjutnya.

4.4.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis (Uji t-test) digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual (parsial) dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2019). Kriteria pengujian Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Tabel 4.10
Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.737	.361		2.042	.049
Ukuran Pemerintah	.000	.013	-.006	-.034	.973
Tingkat Kemandirian	-.037	.022	-.281	-1.689	.100
Ukuran OPD	.006	.002	.535	3.657	.001
Ukuran Legislatif	-.002	.000	-.468	-3.363	.002
Temuan Audit	-.003	.002	-.216	-1.451	.155

a. Dependent Variable: Pengungkapan LKPD
Sumber: data diolah SPSSV26, 2021

Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat t_{hitung} untuk setiap variabel sedangkan t_{tabel} diperoleh melalui tabel T (α : 0.05 dan df: n-5) sehingga α : 0.05 dan Df: 42-5 = 37 maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,026. Maka dapat di ambil kesimpulan setiap variabel adalah sebagai berikut:

1. Variabel ukuran pemerintahan (X1) nilai t_{hitung} sebesar 0,034 artinya bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,034 < 2,026$) dan tingkat signifikan sebesar $0,973 > 0.05$ yang bermakna bahwa H_a ditolak, maka tidak ada pengaruh ukuran pemerintahan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
2. Variabel tingkat kemandirian (X2) nilai t_{hitung} sebesar 1,689 artinya bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,689 < 2,026$) dan tingkat signifikan sebesar $0,100 > 0.05$ yang bermakna bahwa H_a ditolak, maka tidak ada pengaruh tingkat kemandirian terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
3. Variabel ukuran OPD (X3) nilai t_{hitung} sebesar 3,657 artinya bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,657 > 2,026$) dan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0.05$ yang bermakna bahwa H_a diterima, maka ada pengaruh ukuran OPD terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

4. Variabel ukuran legislatif (X4) nilai t_{hitung} sebesar 3,363 artinya bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,363 > 2,026$) dan tingkat signifikan sebesar $0,002 < 0,05$ yang bermakna bahwa H_a diterima, maka ada pengaruh ukuran legislatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
5. Variabel temuan audit (X5) nilai t_{hitung} sebesar 1,451 artinya bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,451 < 2,026$) dan tingkat signifikan sebesar $0,155 > 0,05$ yang bermakna bahwa H_a ditolak, maka tidak ada pengaruh temuan audit terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Ukuran Pemerintahan Terhadap Pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa ukuran pemerintahan yang diukur dengan total aset tidak berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD. Dapat diasumsikan bahwa besar kecilnya suatu pemerintahan saerah tidak akan mempengaruhi pengungkapan LKPD pemda tersebut. Ukuran pemerintahan tidak memberikan pengaruh pada pengungkapan LKPD karena setiap pemda harus mengikuti standar akuntansi pemerintah dalam pembuatan LKPD. Standar akuntansi pemerintah dibuat tanpa mempertimbangkan total aset yang dimiliki pemda. Dengan demikian ukuran besar atau kecilnya pemda tidak memiliki dampak pada penyajian catatan atas laporan keuangan. Pemerintah daerah dengan aset yang besar cenderung mempunyai kualitas pengelolaan aset yang kurang baik dan mendapatkan catatan dari BPK. Pemda sering kali tidak memiliki informasi yang cukup terkait dengan permasalahan yang ada (Waliyyani & Mahmud, 2015).

Menurut Ramdhani (2016) Pemda dengan total aset yang banyak memiliki kualitas pengelolaan aset yang kurang baik, terlihat dari beberapa temuan BPK mengenai pengelolaan aset tetap yang pada akhirnya mendapatkan catatan dari BPK. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakuakn oleh oleh Kogoya (2019), Waliyyani & Mahmud (2015) dan Ramdhani (2016). Para peneliti menyatakan bahwa ukuran pemda tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan LKPD.

4.5.2 Pengaruh Tingkat Kemandirian Terhadap Pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa tingkat kemandirian yang diukur dengan menggunakan pendapatan asli daerah yang dibagi dengan bantuan dari pemerintahan pusat tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian suatu pemerintah daerah, tidak akan memberikan pengaruhnya terhadap pengungkapan LKPD. Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah tidak bergantung pada besarnya tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah menunjukkan semakin mandiri pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga tingkat ketergantungan kepada pihak eksternal menjadi rendah (Lutfia, 2018). Hal inilah yang membuat Pemda tidak termotivasi untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangannya karena rendahnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas LKPD dari pihak eksternal. Menurut Setyaningrum dan Safitri (2012) Rasio kemandirian pemda merupakan indikator kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi pendapatan di daerahnya. Apabila pemda mampu menghasilkan atau memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) yang besar maka, tingkat ketergantungan pemda pada pemerintah pusat akan menurun.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Syafitri (2012) yang menemukan hubungan tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Variabel rasio kemandirian pemerintah daerah tidak signifikan sebagai akibat rendahnya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat. Hasil ini membuktikan semakin besarnya rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah tidak mendorong pemerintah meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangannya. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Hendriyani & Tahar (2015) yang menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan dari pemerintah provinsi di Indonesia.

4.5.3 Pengaruh Ukuran OPD Terhadap Pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa ukuran OPD berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah SKPD yang sedikit maka kompleksitas semakin menurun sehingga pengungkapan menjadi lebih baik. Prinsip kualitas lebih diutamakan daripada kuantitas juga menjelaskan bahwa dengan jumlah SKPD yang lebih sedikit, maka urusan pemerintah menjadi lebih mampu untuk dikontrol dengan baik sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas informasi yang dampaknya hasil pengungkapan menjadi lebih baik (Lutfia, 2018). Semakin banyak OPD yang dimiliki pemerintah daerah akan semakin kompleks dan mudah untuk berkordinasi antara OPD lainnya, sehingga besarnya potensi pencatatan yang kurang akurat. Oleh sebab itu jumlah OPD dapat menajmin adanya peningkatan dalam pengungkapan secara lengkap dalam laporan keuangan. Menurut Hilmi dan Martani (2014), jumlah SKPD menggambarkan jumlah urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam membangun daerah sehingga semakin banyak urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah maka semakin kompleks pemerintah. Untuk memudahkan pengguna memahami kompleksitasnya maka dibutuhkan pengungkapan yang semakin besar pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lesmana (2010), Hilmi (2011), dan Darmastuti (2011). Pemerintah daerah dengan jumlah SKPD yang besar memiliki birokrasi yang lebih kompleks, sehingga tingkat pengawasan terhadap transaksi-transaksi yang terjadi di pemerintah daerah dapat dikatakan rendah. Hal ini mengakibatkan besarnya potensi pencatatan yang tidak akurat. Dengan demikian, jumlah SKPD tidak dapat menjadi jaminan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangannya.

4.5.4 Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa ukuran legislatif dalam hal ini adalah anggota DPRD berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Adanya hubungan positif yang signifikan antara ukuran legislatif dan tingkat pengungkapan LKPD, disebabkan karena DPRD sebagai wakil masyarakat memiliki fungsi pengawasan, yaitu mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan dan pelaporan informasi keuangan Pemerintah Daerah agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas. Dengan demikian, semakin banyaknya jumlah anggota DPRD akan memberikan tekanan yang lebih besar pada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengungkapan secara lengkap (Mustafa, 2019).

Menurut Khasanah (2014), yang menemukan bahwa jumlah anggota legislatif atau DPRD berjalan dengan baik sehingga dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Sehingga diharapkan dengan semakin banyaknya anggota DPRD akan semakin meningkatkan pengawasan yang berujung pada peningkatan pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syafitri (2012) yang menemukan bahwa ukuran legislatif memiliki pengaruh dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan daerah.

4.5.5 Pengaruh Temuan Audit Terhadap Pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Temuan audit merupakan kasus yang ditemukan oleh BPK atas pelanggaran ketentuan pengendalian intern dan peraturan yang berlaku dengan melihat kesesuaian kriteria yang telah ditetapkan. Untuk melihat keadaan sebenarnya dan kriteria, maka diperlukan adanya bukti audit, sehingga dalam melakukan upaya perbaikan pemerintah dapat melampirkan bukti yang ada. Walaupun jumlah temuan audit memiliki jumlah yang tinggi, namun hal tersebut tidak diikuti dengan tingginya pengungkapan LKPD yang harus disajikan. Menurut Naopal (2018) Jumlah temuan tidak

merepresentasikan angka sebenarnya, karena jumlah temuan yang banyak belum tentu nilainya material. Artinya jumlah temuan yang banyak belum tentu terdiri dari temuan yang membutuhkan tindak lanjut atau penyajian pengungkapan dalam CaLK begitupun sebaliknya bahwa jumlah temuan yang sedikit belum tentu terdiri dari jumlah temuan yang tidak membutuhkan tindak lanjut atau penyajian pengungkapan dalam CaLK.

Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Waliyyani dan Mahmud (2015) serta penelitian Hendriyani dan Tahar (2015) yang menyatakan bahwa temuan audit tidak memiliki pengaruh kepada tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan pengukuran variabel temuan yang hanya menggunakan jumlah temuan saja sehingga kurang sesuai.